

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Beberapa tahun terakhir, isu keberlanjutan (*Sustainability*) telah menjadi isu global akibat berbagai tantangan seperti kerusakan lingkungan, perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan lemahnya tata Kelola. Dalam konteks akuntansi, ESG menjadi landasan dari berkembangnya akuntansi keberlanjutan (*sustainability accounting*), yaitu praktik akuntansi yang tidak hanya mencatat dan melaporkan informasi keuangan, tetapi juga informasi non-keuangan terkait kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola organisasi. Faktor ESG telah diimplementasikan dengan memperhatikan aspek non-keuangan yang berkontribusi terhadap pembentukan kondisi kelembagaan kemasyarakatan secara lebih baik (Ab Aziz, 2022). Menurut penelitian dari Nur Mardlatillah Islamiati (2023) konsep *Environmental, Social, and Governance* (ESG) pertama kali diperkenalkan melalui inisiatif *Who Cares Wins* oleh PBB pada 2004, yang mendorong sektor keuangan global untuk mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam pengambilan keputusan investasi. ESG kini berkembang menjadi standar penilaian keberlanjutan yang diadopsi luas di berbagai sektor, termasuk lembaga sosial dan kemasyarakatan.

Environmental, Social, and Governance (ESG) adalah konsep yang digunakan untuk mengukur keberlanjutan serta dampak dari pembangunan,

investasi, atau aktivitas bisnis. ESG mengacu pada pemanfaatan faktor Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola dalam menilai tingkat keberlanjutan perusahaan maupun negara (Brogi & Lagasio, 2019). Aspek lingkungan mencakup peran perusahaan atau pemerintah dalam mengelola sumber daya alam, mengurangi emisi karbon, melestarikan keanekaragaman hayati, serta menangani limbah (Cornell, 2020). Selain itu, aspek ini menekankan pentingnya praktik yang berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan, perlindungan sumber daya air, serta upaya adaptasi terhadap perubahan iklim, yang semuanya berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Aspek sosial berfokus pada pengaruh kebijakan atau aktivitas perusahaan dan pemerintah terhadap kesejahteraan sosial. Ini mencakup perlakuan terhadap tenaga kerja, penghormatan terhadap hak asasi manusia, keterlibatan dalam komunitas, kesetaraan gender, serta perlindungan bagi kelompok rentan. Nilai sosial meningkat ketika perusahaan berinteraksi secara positif dengan masyarakat lokal, sehingga memperoleh "izin sosial" untuk beroperasi dan didukung oleh masyarakat (Morgan, 2020). Aspek tata kelola melibatkan prinsip-prinsip pemerintahan yang berlandaskan pada keandalan informasi, akuntabilitas, transparansi, kepatuhan terhadap aturan, serta efisiensi dalam pengelolaan manajemen pemerintahan.

Penerapan ESG telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia. Perusahaan, pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan masyarakat secara keseluruhan semakin menyadari pentingnya

memperhitungkan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola. Hal ini dapat mengurangi risiko, meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan, dan menghasilkan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Salah satu contoh penerapan ESG pada pemangku kepentingan khususnya lembaga kemasyarakatan dalam aspek lingkungan dan sosial adalah program pengurangan limbah atau pengelolaan sampah. Selain itu, adanya program kampung wisata juga mendukung penerapan ESG dalam aspek tata kelola. Program-program tersebut telah dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan. Namun, dalam penerapannya masih terdapat yang belum sepenuhnya mengadopsi prinsip tata kelola yang baik, transparansi atau keberpihakan terhadap isu lingkungan dan sosial secara sistematis.

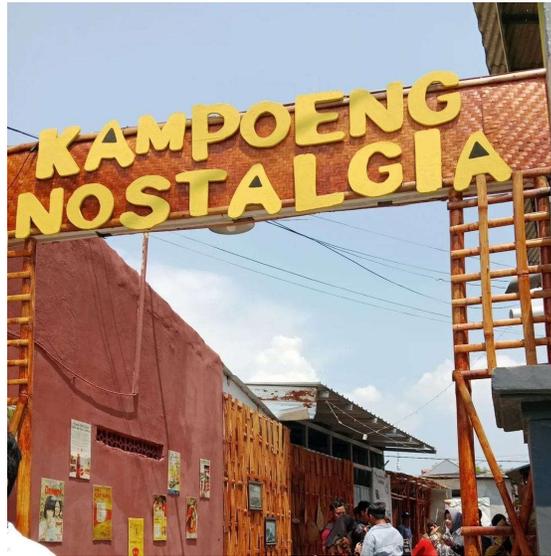
Surabaya adalah salah satu wilayah terpadat di Indonesia, dengan populasi mencapai 3,2 juta jiwa pada awal 2024 menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya. Jumlah penduduk yang besar ini menjadikan Surabaya sebagai kota dengan kepadatan tertinggi di Jawa Timur, provinsi terpadat kedua di Indonesia. Peningkatan populasi setiap tahun menciptakan tantangan bagi pemerintah dalam menyediakan layanan yang optimal bagi masyarakat. RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga) adalah struktur organisasi terkecil dalam masyarakat Indonesia yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah di tingkat lokal. Dalam penerapan ESG, RT dan RW berperan penting dalam mendukung keberlanjutan lingkungan, pembangunan sosial, dan tata kelola yang baik. Mereka melaksanakan program

pengelolaan sampah dan kebersihan, memelihara keharmonisan sosial, serta memastikan transparansi dan keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan.

Meskipun konsep *Environmental, Social, and Governance* (ESG) semakin diakui penting dalam penguatan lembaga kemasyarakatan, implementasinya di tingkat pemerintahan masih menghadapi berbagai tantangan. Dari aspek lingkungan (*Environmental*), beberapa inisiatif seperti program pembangunan kampung wisata dan pengelolaan sampah di wilayah RT 004 RW 001 Banjar Sugihan Surabaya belum berjalan secara optimal. Minimnya partisipasi warga dalam kegiatan tersebut menyebabkan rendahnya keberhasilan program lingkungan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam aspek sosial (*Social*), partisipasi warga dalam kegiatan kemasyarakatan juga masih belum merata. Kesenjangan antara warga yang aktif dan yang kurang terlibat menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan program sosial, serta berdampak pada kohesi sosial di tingkat RT dan RW. Sementara itu, dari sisi tata kelola (*Governance*), permasalahan seperti rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana iuran warga masih menjadi isu utama. Mayoritas warga tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai alokasi dan penggunaan dana, sehingga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan terhadap kepengurusan RT dan RW. Oleh karena itu, penerapan prinsip ESG secara menyeluruh dan terstruktur menjadi kebutuhan mendesak untuk

menciptakan tata kelola lembaga kemasyarakatan yang berkelanjutan, partisipasi, dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Dalam konteks RT dan RW khususnya pada wilayah Banjar Sugihan RT 004 RW 001, penerapan ESG dapat membantu memperbaiki pengelolaan lingkungan melalui inisiatif warga Masyarakat seperti program pembangunan kampung wisata dan pengelolaan sampah plastik/bank sampah secara efisien. Pada aspek sosial, ESG berperan dalam memperkuat hubungan sosial antar warga melalui partisipasi aktif dalam kegiatan komunitas, gotong royong, dan program sosial yang inklusif. Di sisi tata kelola, penerapan prinsip ESG akan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan akuntabilitas dari pengurus RT dan RW, sehingga warga merasa lebih percaya dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan di komunitas mereka. Dengan demikian, penerapan ESG dapat menjadi solusi strategis untuk mewujudkan tata kelola yang lebih baik dan berkelanjutan di tingkat RT dan RW.



Gambar 1.1 Kampung Wisata (Kampoeng Nostalgia)

Peneliti memilih wilayah Banjar Sugihan RT 004 RW 001 sebagai objek penelitian. Dalam beberapa kasus, permasalahan ini dapat diatasi melalui penerapan ESG, yang menawarkan kerangka kerja terpadu dengan mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Melalui survei singkat berupa wawancara langsung dengan masyarakat dan pengurus wilayah Banjar Sugihan, khususnya RT 004 dan RW 001, terkonfirmasi bahwa aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang digunakan selama ini hanya melanjutkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pengurus wilayah sebelumnya. Dengan demikian, peneliti yakin bahwa objek yang dipilih dapat memberikan jawaban yang memadai terhadap kesenjangan dan pertanyaan yang ada dalam penelitian ini.

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Elaborasi *Environmental, Social, and Governance* pada Lembaga Kemasyarakatan RT 004 dan RW 001 Banjar Sugihan Surabaya**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi prinsip *environmental* pada tingkat RT 004 dan RW 001 Banjar Sugihan Surabaya dapat membantu memperbaiki pengelolaan sampah dan pengelolaan lahan?
2. Bagaimana implementasi prinsip *social* pada tingkat RT 004 dan RW 001 Banjar Sugihan Surabaya dapat meningkatkan interaksi sosial antar warga?
3. Bagaimana implementasi prinsip *governance* pada tingkat RT 004 dan RW 001 Banjar Sugihan Surabaya dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan mengevaluasi implementasi prinsip *environmental* pada tingkat RT 004 dan RW 001 Banjar Sugihan Surabaya dalam membantu memperbaiki pengelolaan lingkungan.
2. Menganalisis dan mengevaluasi implementasi prinsip *social* pada tingkat RT 004 dan RW 001 Banjar Sugihan Surabaya dalam meningkatkan interaksi sosial antar warga.

3. Menganalisis dan mengevaluasi implementasi prinsip *governance* pada tingkat RT 004 dan RW 001 Banjar Sugihan Surabaya dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu, menambah pengetahuan dan wawasan dalam ilmu akuntansi khususnya di bidang ESG dan pelayanan publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai *Environmental Social Governance* (ESG) dan pelayanan publik.

b. Bagi Almamater Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, perbandingan, dan referensi dari mata kuliah akuntansi manajerial untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Surabaya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk rukun tetangga dan rukun warga dalam mewujudkan laporan non keuangan pada sektor lingkungan, sosial, dan tata kelola melalui pelayanan publik.